



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

# KONTRIBUSI REALISASI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**FAJRI NURSALIM**  
**NIM. 01870614002**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : FAJRI NURSALIM  
 NIM : 01870614002  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VII (TUJUH)  
 JUDUL : KONTRIBUSI REALISASI PAJAK BEA BALIK  
 NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI RIAU  
 TANGGAL UJIAN : 27 OKTOBER 2021

Pekanbaru, November 2021

Disetujui Oleh :

**PEMBIMBING**

Khairil Henry, S.E., M.Si, Ak  
 NIP. 19751129 200801 1 009

Mengetahui :

**DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI**  
 D3 Administrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A  
 NIP. 19790911 201101 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : FAJRI NURSALIM  
 NIM : 01870614002  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VII (TUJUH)  
 JUDUL : KONTRIBUSI REALISASI PAJAK BEA BALIK NAMA  
 KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI RIAU  
 TANGGAL UJIAN : 27 OKTOBER 2021  
 Pekanbaru, November 2021

Disetujui Oleh :  
**KETUA PENGUJI**

Dr. Hariza Hasvim, SE, M.Si  
 NIP. 19760910 200901 2 003

**ANGGOTA**

**PENGUJI I**

Ari Nurwahidah, SE, MM  
 NIP. 197801052007102001

**PENGUJI II**

Muslim, S. Sos, M. Si  
 NIP. 19820205 201503 1 002

UIN SUSKA RIAU





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

© Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fajri Nursalim  
 NIM : 01870614002  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 26 Juli 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

KONTRIBUSI REALISASI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 September 2021  
 Yang membuat pernyataan



NUKSALIM

NIM : 01870614002

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **KONTRIBUSI REALISASI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI RIAU**

Oleh :

**FAJRI NURSALIM**  
**NIM. 01870614002**

*Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan difokuskan terhadap Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan pendapatan pajak daerah, serta untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan wawancara dengan pejabat kepala bidang penerimaan pajak daerah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan dua metode, metode pertama yang digunakan adalah metode wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan kepala bidang penerimaan pajak daerah, dan metode yang kedua adalah metode observasi dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam bagaimana Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau, hasil yang diperoleh dalam melakukan penelitian tentang bagaimana Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau, adalah sudah cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Dan juga penelitian ini diharapkan memberi informasi yang jelas dan bermanfaat terhadap pembaca dan penulis.*

**Kata Kunci : Kontribusi, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),  
Pendapatan Asli Daerah (PAD)**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau”. Adapun penulisan tugas akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kepada Orang Tua saya, Ayahanda Kris Setiadji dan Ibunda Puji Astuti yang selalu memberi dukungan, motivasi serta do'a restu kepada penulis agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag** selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak **Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu **Prof. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu **Dr. Mahmuzar, SH, MH** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak **Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak **Jhon Afrizal, SHI, MA** selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak **Muslim, S.Sos, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negri Islam Sultan Syarif Kasim Riau
9. Bapak **Khairil Henry, SE, M.Si, Ak.** Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberi bimbingan, arahan, dan saran serta yang selalu memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Bapak serta Ibu Dosen yang telah turut serta dalam memberikan masukan dan membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuan, dan seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak membantu kelancaran dalam urusan tugas akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bapak **Muhammad Sayoga, SE, M.Si** selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan pegawai lainnya yang telah memberi izin melakukan penelitian dan memberikan bantuan berupa data maupun informasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Terima kasih kepada teman-teman penulis terutama kepada Apridah, Fauzia, Melsi, Vera, Askia, Chairul, Rachmad, Riggih, Rozy, Sherly, Wawan dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk selama ini telah membantu saya dan memberikan motivasi.

13. Dan juga kepada semua pihak yang ikut memberi bantuan berupa semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ketulusan hati yang telah diberikan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran sangat bermanfaat dalam menyempurnakan tugas akhir ini agar hasil yang didapat lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin ya Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Penulis

**FAJRI NURSALIM**  
**NIM. 01870614002**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	5
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.5.1. Lokasi Penelitian .....	6
1.5.2. Waktu Penelitian.....	6
1.5.3. Jenis Data.....	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data .....	7
1.6. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	9
2.3 Uraian Tugas ( <i>Job Description</i> ) Bagian / Unit Kerja .....	10
2.3.1 Kepala Badan.....	10
2.3.2 Sekretaris .....	11
2.3.3 Kepala Bidang Pajak Daerah .....	15
2.3.4 Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil .....	19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.5 Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan.....	22
2.3.6 Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan .....	27
2.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	30
<b>BAB III TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>31</b>
3.1. Tinjauan Teori.....	31
3.1.1. Pengertian Kontribusi .....	31
3.1.2. Pengertian Pajak .....	32
3.1.3. Fungsi Pajak.....	32
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	34
3.1.5. Jenis-jenis Pajak.....	35
3.1.6. Asas-asas Pemungutan Pajak.....	37
3.1.7. Definisi Pajak Daerah .....	37
3.1.8. Pendapatan Asli Daerah.....	38
3.1.9. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	39
3.1.10. Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	44
3.1.11. Dasar Hukum Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	44
3.1.12. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	45
3.1.13. Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB .....	46
3.1.14. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	47
3.1.15. Pajak Dalam Islam .....	48
3.2. Tinjauan Praktek .....	54

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1. Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.....	54
3.2.2. Prosedur pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. ....	57
3.2.3. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ....	61
3.2.4. Perbandingan Teori dan Praktek.....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
4.1. Kesimpulan .....	65
4.2. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2020 Kota Pekanbaru .....	2
Tabel 3.1	Target, realisasi dan kontribusi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	30
Gambar 3.1	Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan .....	58
Gambar 3.2	Kuitansi jual beli kendaraan.....	58
Gambar 3.3	Formulir Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor .....	59
Gambar 3.4	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) .....	60
Gambar 3.5	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor .....	61
Gambar 5.1	Lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	70
Gambar 5.2	Lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	70
Gambar 5.3	Kondisi wajib pajak mengantre melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor.....	71



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib, kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafat Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam mendukung pembangunan nasional pajak dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. sumber penerimaan negara dari pajak harus ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Salah satunya dengan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang memiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur penyumbang pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan pembangunan otonomi daerah. Tinggi rendahnya jumlah PAD sangat tergantung bagaimana suatu daerah mampu mengembangkan dan menggali potensi daerah mereka sendiri, agar PAD tersebut mampu memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan dan belanja suatu daerah. Sumber-sumber PAD dalam suatu daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan keleluasaan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menjalankan otonomi daerahnya dan pengelolaan dan pengembangan berbagai sumber daya yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Berdasarkan asas otonomi daerah, terdapat permasalahan tentang peningkatan upaya penerimaan daerah melalui pajak yaitu salah satunya pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat sehingga minat masyarakat mengalami peningkatan untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat di masyarakat. Adapun jumlah penerimaan pajak dan target penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru tahun 2018-2020.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 - 2020 Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Target Penerimaan BBNKB	Realisasi	Persentase
1	2018	Rp. 828.905.290.108	Rp. 883.868.622.399	106,6 %
2	2019	Rp. 855.430.259.391	Rp. 802.194.810.924	93,7 %
3	2020	Rp. 744.281.828.040	Rp. 558.925.504.891	75,0 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2021)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, 2019 dan 2020 Target Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengalami peningkatan dan penurunan, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terus mengalami penurunan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1.1 diatas dimana pada tahun 2018 realisasi sebesar Rp. 883.868.622.399 dari target Rp. 828.905.290.108,- atau 106,6 % dan pada tahun 2019 mengalami penurunan Rp. 802.194.810.924,- dari target Rp. 855.430.259.391,- atau 93,7 %, dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 558.925.504.891 dari target Rp. 744.281.828.040 atau 75%. Hal ini bisa terjadi dikarenakan dampak dari wabah virus *Covid-19* yang masuk ke Indonesia.

Sehubungan dengan pembahasan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau ?
2. Bagaimana prosedur pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ?





### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapatlah sebuah tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### 1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah secara akademis dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan. Sedangkan secara praktis sebagai berikut :

1. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya tentang prosedur pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi agar bisa digunakan bagi penelitian berikutnya.
3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan bahan kajian bagi badan pengelolaan pajak daerah Kota Pekanbaru untuk dapat dipergunakan seperlunya dan bermanfaat bagi Kota Pekanbaru dan masyarakat.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Simpang Tiga, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

### 1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2021.

### 1.5.3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:139) bahwa “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari objek penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan langsung dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan masalah penelitian.

#### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah : “Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Silalahi (2012:289) pengertian data sekunder yaitu: “Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan”. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang dikelompokkan dari lembaga pengumpul yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, data yang didapat dari buku, dokumen dan informasi lainnya.

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interview* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
- b. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu, suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bab, dengan uraian sebagai berikut :





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Visi dan Misi serta struktur organisasi.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI**

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian atau definisi kontribusi, pajak, fungsi pajak, definisi pajak daerah, serta prosedur pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penulisan yang dilakukan.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dinas Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November 1980.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yaitu : Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau secara profesional. Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

## 2.3 Uraian Tugas (*Job Description*) Bagian / Unit Kerja

### 2.3.1 Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala badan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.

### 2.3.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbagian perencanaan program, subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan subbagian kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### A. Kepala Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian perencanaan program.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian perencanaan program.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja pemerintah daerah, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah unit kerja.
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur.
- f. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian perencanaan program dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**B. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
- c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
- d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.
- f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.
- g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah.
- h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
- i. Melaksanakan proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.
- k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset.
- l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja.
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berkala pada subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah dan

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**C. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum**

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian kepegawaian dan umum.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian kepegawaian dan umum.
- c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
- d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian.
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa beban kerja, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
- f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai.
- g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian.
- h. Menyelenggarakan urusan kehumasan.
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- m. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian kepegawaian dan umum dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.3.3 Kepala Bidang Pajak Daerah

Kepala bidang pajak daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, subbidang penerimaan pajak daerah lainnya, dan subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pajak daerah.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pajak daerah.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan pendapatan daerah dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**A. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- c. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- d. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- e. Menetapkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- f. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap nilai jual kendaraan bermotor.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara berkala.
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan kantor bersama Samsat untuk peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**B. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya**

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan pajak daerah lainnya.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan pajak daerah lainnya.
- c. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah lainnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pajak daerah lainnya.
- e. Menetapkan target penerimaan pajak daerah lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Lainnya secara berkala.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya.
- h. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah lainnya.
- i. Melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian penerimaan pajak daerah lainnya.
- j. Menetapkan target penerimaan pajak daerah lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.
- k. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah lainnya secara berkala.
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan pajak daerah lainnya.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya..

#### C. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah

Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota.
- e. Menghimpun dan memverifikasi penerimaan pajak daerah untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah.
- f. Melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil pajak daerah dengan instansi terkait dan kabupaten/kota.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.3.4 Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil**

Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang retribusi, pendapatan asli daerah lainnya dan dana bagi hasil.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang retribusi, pendapatan asli daerah lainnya dan dana bagi hasil.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan Pendapatan Daerah dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**A. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya**

Kepala subbidang penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
- c. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek potensi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
- d. Melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuaian perhitungan pengenaan tarif retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi pemungut retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Menetapkan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### B. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Kepala subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak.
- c. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber dana bagi hasil pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menetapkan target dana bagi hasil pajak.
- e. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil pajak pada rekening kas umum daerah.
- f. Melakukan koordinasi penerimaan dana bagi hasil pajak.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



### C. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Kepala subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak.
- c. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber dana bagi hasil bukan pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menetapkan target dana bagi hasil bukan pajak.
- e. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak.
- f. Melakukan koordinasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak dan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.3.5 Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

Kepala bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada subbidang pengembangan sistem informasi, subbidang pengembangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan, dan subbidang pengolahan data pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan pendapatan daerah dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**A. Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi**

Kepala subbidang pengembangan sistem informasi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pengembangan sistem informasi.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengembangan sistem informasi.
- c. Melakukan kajian kebijakan teknis pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.
- e. Melakukan kajian petunjuk teknis di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.
- f. Menyelenggarakan tugas teknis penyelenggaraan kegiatan teknis penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional badan, sesuai urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.
- g. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan administrasi dari aspek pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.
- h. Menyelenggarakan sistem teknologi informasi di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.
- i. Menyelenggarakan pengendalian, *monitoring*, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem pendapatan dan aplikasi pendapatan.
- j. Melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan infrastruktur teknologi informasi pendapatan.
- k. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur teknologi informasi pendapatan.
- l. Melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pendapatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur teknologi informasi pendapatan.
- n. Melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan teknologi informasi pendapatan.
- o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pengembangan sistem informasi; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**B. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan**

Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pengembangan pendapatan.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengembangan pendapatan.
- c. Melakukan pengembangan pelayanan dan pendapatan.
- d. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi pajak daerah, retribusi daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah.
- e. Menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan pendapatan daerah.
- f. Melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pengembangan pendapatan dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### C. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan

Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pengolahan data pendapatan.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengolahan data pendapatan.
- c. Menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk menyusun target tahunan pendapatan daerah untuk masing-masing unit pelaksana teknis dinas dan unit pelayanan teknis.
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data pendapatan.
- e. Melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang pengolahan data pendapatan.
- f. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- g. Menyusun target pendapatan/penerimaan daerah periode tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pengolahan data pendapatan dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.3.6 Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan**

Kepala bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan subbidang pembukuan dan pelaporan, subbidang pengawasan dan penerimaan daerah, dan subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan pendapatan daerah dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **A. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan**

Kepala subbidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pembukuan dan pelaporan.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pembukuan dan pelaporan.
- c. Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah.
- d. Melakukan koordinasi dengan kas daerah dan bidang teknis intern.
- e. Menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan penerimaan pendapatan daerah.
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pembukuan dan pelaporan dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **B. Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah**

Kepala subbidang pengawasan dan penerimaan daerah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pengawasan dan penerimaan daerah.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengawasan dan penerimaan daerah.
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara berkala pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana pendapatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pengawasan dan penerimaan daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### C. Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan

Kepala subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan.
- c. Memfasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan baik eksternal maupun internal.
- d. Melakukan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala.
- e. Memfasilitasi sistem pengendalian internal.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana pendapatan.
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang tindak lanjut pengawasan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

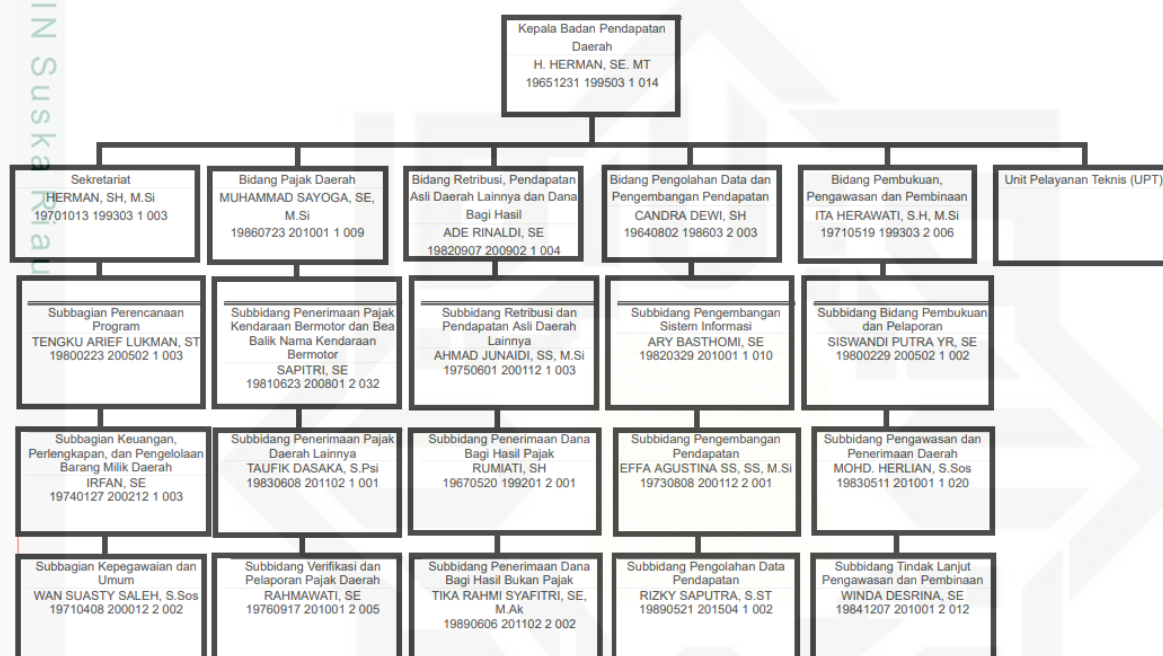
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**



Sumber : <https://badanpendapatan.riau.go.id/struktur/>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan dikorelasikan berdasarkan teori pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini peneliti merumuskan rekomendasi saran-saran yang dapat bermanfaat untuk mewujudkan roda dua yang efektif.

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau, dapat disimpulkan :

1. Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 - 2020 memiliki rata-rata sebesar 25,1%. Ini menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sudah cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.
2. Untuk prosedur pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah sesuai prosedur yang ada dimana dalam prosesnya terdapat 6 (enam) langkah yaitu menyiapkan semua berkas, cek fisik kendaraan, mendaftarkan berkas ke Ditlantas, mendaftarkan kembali ke Samsat, mencetak TNKB, dan mengambil BPKB pemilik baru.
3. Upaya Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai pemungut Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki upaya dan strategi serta inovasi untuk bisa menarik perhatian wajib pajak untuk membayar BBNKB dengan cara komunikasi, kerjasama, kebijakan dan sistem pelayanan sehingga bisa meningkatkan pendapatan BBNKB sebagai kontribusi terbesar dalam susunan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah hendaknya meningkatkan pengawasan melalui penelusuran kepada setiap wajib pajak sehingga lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama ketika membeli kendaraan dari pihak pertama.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi wajib pajak hendaknya terbuka dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama ketika membeli kendaraan kepada pihak pertama agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutanganya, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Pembaca

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti Pajak Daerah lainnya yang kontribusinya sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan ada perubahan kearah yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ahira, Anne. 2012. *Pengertian Kontribusi*. Bandung: Kencana

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit andi.

Rompis, Natalia. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada SAMSAT Airmadidi),

Rahayu, Siti Kurnia . 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihot P, 2014, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

### Website :

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25005>, diakses pada 2 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> diakses pada 20 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

<https://badanpendapatan.riau.go.id/struktur/>, diakses pada 20 Agustus 2021 pukul 20.28 WIB.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

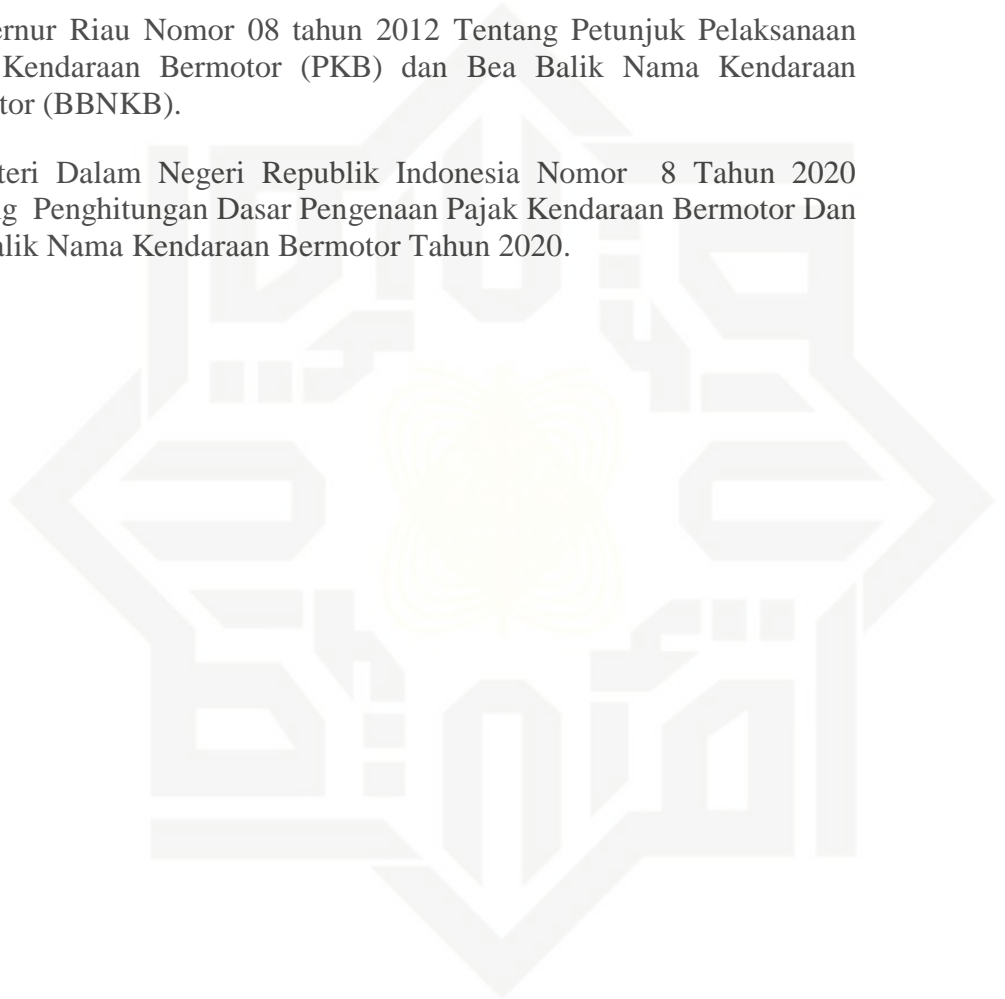
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/20076>, diakses pada tanggal 14 september pukul 17.08 WIB

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.



UIN SUSKA RIAU



## LAMPIRAN

### 1. Gambar

Berikut adalah gambar lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau:

Gambar 5.1 lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Gambar 5.2 lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5.3 kondisi wajib pajak mengantri melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Daftar pertanyaan wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dengan Bapak Muhammad Sayoga, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Apa saja persyaratan untuk bea balik nama kendaraan bermotor ?
2. Bagaimanakah prosedur pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor ?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses bea balik nama kendaraan bermotor ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi saat melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor ?
5. Apa solusi dalam menghadapi kendala yang terjadi tersebut ?
6. Apakah BAPENDA dapat bekerja secara efektif dengan kondisi yang terjadi pada saat ini ?
7. Apakah jumlah pegawai pemberi layanan yang ada sudah cukup dalam melayani masyarakat ?
8. Apakah terjadi peningkatan jumlah masyarakat dalam membayar pajak bea balik nama kendaraan bermotor ?
9. Apa yang dilakukan BAPENDA untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru ?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN/ANGGARAN 2018			TAHUN/ANGGARAN 2019			TAHUN/ANGGARAN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
A	Pajak Daerah	3.203.607.923.218,25	3.075.986.228.121,37	96,02	3.124.921.490.773,74	2.989.749.791.033,00	95,67	2.830.582.119.760,60	2.783.421.363.943,00	98,33
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	995.110.774.084,48	1.049.350.992.438,00	105,45	1.062.771.147.543,09	1.129.336.200.214,00	106,26	1.020.766.765.232,00	1.109.838.807.024,00	108,73
	Pajak Kendaraan di atas Air (PA 3)		-		7.159.178,93	13.374.300,00	186,81	-	9.877.800,00	
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	828.905.290.108,28	883.868.622.399,00	106,63	855.430.259.391,75	802.194.810.924,00	93,78	744.281.828.040,60	558.925.504.891,00	75,10
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	898.335.173.694,61	781.047.474.074,37	86,94	794.211.888.436,41	713.227.575.843,00	89,80	637.167.099.272,00	645.163.654.363,00	101,26
	Pajak Air Permukaan (AP) / PABT	65.298.089.480,89	28.957.476.717,00	44,35	30.498.711.394,56	32.089.318.423,00	105,42	36.861.780.172,00	34.695.707.476,00	94,12
	Pajak Rokok	415.958.595.849,99	332.761.662.493,00	80,00	382.062.324.829,00	312.888.511.329,00	81,89	391.504.647.044,00	434.787.812.389,00	111,06





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.L/PP.00.9/4173/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Laporan Penelitian

Pekanbaru, 18 Agustus 2021 M  
9 Muharram 1443 H

Kepada  
Yth. **Dr. Khairil Henry, SE, M. Si, Ak**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Fajri Nursalim  
NIM : 01870614002  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panam Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4174/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 18 Agustus 2021 M  
9 Muharram 1443 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Fajri Nursalim  
NIM. : 01870614002  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panam Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43183  
T E N T A N G



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4174/2021 Tanggal 18 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

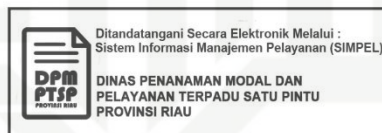
- |                      |   |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | <b>FAJRI NURSALIM</b>                                                                                                                                               |
| 2. NIM / KTP         | : | 01870614002                                                                                                                                                         |
| 3. Program Studi     | : | PERPAJAKAN                                                                                                                                                          |
| 4. Jenjang           | : | DIII                                                                                                                                                                |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                                                           |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>KONTRIBUSI REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PANAM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU</b>                                                               |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2021



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284  
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755  
Website : [www.badanpendapatan.riau.go.id](http://www.badanpendapatan.riau.go.id)

**NOTA-DINAS**

Kepada : Kepala Bidang Pajak Daerah dan Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan  
Dari : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau  
Tanggal : 31 Agustus 2021  
Nomor : 071/ND/BAPENDA//2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Riset

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tanggal 23 Agustus 2021 Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/43183, Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, bersama ini diharapkan kepada saudara untuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan.

Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan yaitu :

Nama : **FAJRI NURSALIM**  
NIM : 01870614002  
Program Studi : PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : **KONTRIBUSI REALISASI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KOTA PEKANBARU**

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dapat ditindaklanjuti.

**a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI RIAU  
SEKRETARIS**

u.b.

**KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN UMUM,**

**WAN SUASTY SALEH, S. Sos**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710408 200012 2 002

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284  
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755  
Website : [www.badanpendapatan.riau.go.id](http://www.badanpendapatan.riau.go.id)

Pekanbaru, 16 September

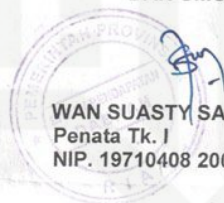
Kepada Yth :  
Dekan UIN SUSKA RIAU  
Di-  
Pekanbaru

Nomor : 071/Bapenda/11/978  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Dengan ini kami beritahukan bahwasanya mahasiswa Bapak yang bernama **FAJRI NURSALIM** benar telah melakukan riset di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI RIAU  
SEKRETARIS  
u.b.  
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN UMUM,



WAN SUASTY SALEH, S. Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19710408 200012 2 002

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Fajri Nursalim lahir di Pekanbaru, 26 Juli 2000. Merupakan Putra dari Ayahanda yang bernama Kris Setiadji dan Ibu bernama Puji Astuti. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 012 Pekanbaru pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Pekanbaru yang berakhir pada tahun 2015. Dilanjutkan pada pendidikan tingkat atas yaitu pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2018. Tepatnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) dengan Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dibawah Bimbingan Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak. dengan judul “**KONTRIBUSI REALISASI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI RIAU**” .

UIN SUSKA RIAU